

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, (Jakarta: Pradnya Paramita 1982), hal. 42
- Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Edisi 2, (PT Sofmedia: 2010), hal. 122
- Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan Kepailitan*, Cetakan ke-1. (Bandung: CV Nuansa Aulia, November 2006), Hal. 65
- Zaeny Asyhadie, *Hukum Bisnis Proses dan Pelaksanaanya di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), Hal. 225
- Victor Situmorang dan Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994). Hal. 18
- Siti Soemarti Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, (Yogyakarta: 1981)
- Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung: Alumni, 1982). Hal. 7
- Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Hal. 170
- Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012), Hal. 53
- Ibid.* Hal. 54
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hal. 19-20
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011), hal. 28

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana , 2008), hal.

158

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya,

2004), Hal. 102

Ibid. hal. 27-28

Mukti Fajar dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*,

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), Hal. 33

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia

press, 1986), Hal. 52

Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit.* Hal. 181

Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar Hukum Metode Penelitian*, (Jakarta: PT

Raja Grafindo Persada, 2010), Hal. 133

Mukti Fajar dan Yulianto. *Op. Cit.* Hal. 157

Ibid. Hal. 321

Rudy Lontoh, *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban*

Pembayaran Utang, (Bandung: Alumni, 2001), Hal. 125

Rudi Lontoh. *Op. Cit.* Hal. 125

M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*, Cetakan Ke-4, (Jakarta: Kencana, 2014), Hal.

162

Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*

di Indonesia, (Bandung, Pustaka Cipta Reka, 2013), Hal. 54

Philipus Mandiri Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesi*, (Surabat:

Bina Ilmu. 1987), Hal. 38

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), Hal. 69

Rudy A. Lontoh et al., *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung, PT. Alumni, 2001), hal.23

Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), hal. 119.

Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), Hal. 11

Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, (Jakarta, PT Pustaka Utama Grafiti, 2009), hal.. 55

Howard Seife, *Bankruptcy Law Client Strategies in Europe*, (American Bar Association, 2006), hal..112.

Bob Wessels dan Stephan Madaus, *EU Regulation on Insolvency Proceedings: An Introductory Analysis*, (Wolters Kluwer, 2017), hal. 78

Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pembelajaran Tata Hukum Indonesia*, Cetakan Ke-10, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal.. 23

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana: Prenada Media Group, 2005), hal. 199.

Lilik Mulyadi, *Pergeseran Perspektif dan Praktek dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hal.. 164

Ibid., hal. 165

Bambang Sutiyo, *Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), hal.. 6

Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal.. 104

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty,
2002), hal.. 108

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan
Kejahatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hal.. 23

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal..
28

Ibid., hal..30

Jurnal

Abi Jam'an Kurnia, "Tugas-Tugas Kurator dan Hakim Pengawas", *Hukum Online*,
15 November, 2018

R. La Porta, "Investor Protection and Corporate Governance", *Journal of Financial
Economics*, Tahun 2000, hal. 58

Peraturan Perundang – Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Pasal 72

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Pasal 74.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Penjelasan Umum*. Hal. 304

Jerry Horr, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia (Indonesian Bankruptcy Law)*, Diterjemahkan oleh Kartini Muljadi, (Jakarta: Tata Usaha, 2000), Hal. 66

Munir Fuady, *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020, tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang, tanggal 29 April 2020

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Pasal 17 ayat (1)

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 67

Kamus

R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1973). Hal. 225

Internet

Moh. Mahfud MD. *Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*.

(disampaikan pada acara seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara". 8

Januari 2009